



IKATAN
PENDUKUNG
KEMERDEKAAN
INDONESIA

POLICY BRIEF DPP IP-KI

**ANALISA KAJIAN DAN
REKOMENDASI DPP IP-KI
TERHADAP DINAMIKA SOSIAL,
POLITIK DAN HUKUM
DI INDONESIA**



Bagian dari

**KAJIAN STRATEGIS KEBIJAKAN NASIONAL (KSKN)
DEWAN PENGURUS PUSAT
IKATAN PENDUKUNG KEMERDEKAAN INDONESIA
(DPP IP-KI)**

Tanggal Terbit :

Kamis, 6 Maret 2025

Tim Penulis, Desain dan Layout :

Sekretaris Jenderal DPP IP-KI, Troy Aldi Pratama
Tim Kesekjenan DPP IP-KI

Kontributor :

Wakil Ketua Dewan Pembina DPP IP-KI, Prof Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum
Wakil Ketua Dewan Pakar DPP IP-KI, Bpk M Fuad Nasar, S.Sos., M.Sc
Wakil Ketua Dewan Pakar DPP IP-KI, Bpk Johnny W Maukar, SH., MM
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP IP-KI, Prof Dr. Cecep Darmawan, S.H., S.I.P.,
S.A.P., S.Pd., M.H., CPM

ANALISA KAJIAN DAN REKOMENDASI DPP IP-KI TERHADAP DINAMIKA SOSIAL, POLITIK DAN HUKUM DI INDONESIA

LATAR BELAKANG

Sebagai organisasi kebangsaan yang memiliki tanggung jawab moral terhadap dinamika sosial, ekonomi, politik, penegakan hukum dan terwujudnya cita-cita konstitusi undang-undang dasar tahun 1945 di Indonesia, DPP IP-KI terus mencermati berbagai isu strategis yang berdampak luas pada masyarakat dan negara. Dalam rapat pimpinan harian, berbagai fenomena yang berkembang telah dirangkum sebagai bahan kajian mendalam untuk menentukan sikap dan usul saran strategis IP-KI kepada para pemangku kebijakan.

Untuk memperkaya perspektif dan memastikan bahwa rekomendasi yang disusun berbasis analisis yang objektif dan komprehensif, DPP IP-KI secara resmi telah meminta saran dan masukan dari Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Dewan Pertimbangan. Respon yang telah diterima menjadi bahan utama dalam menyusun rekomendasi kebijakan yang tidak hanya bersifat konstruktif, tetapi juga dapat dijadikan acuan dalam mendorong perubahan yang lebih baik di berbagai sektor kebangsaan dan kenegaraan.

IDENTIFIKASI ISU UTAMA DAN TANGGAPAN

AKUNTABILITAS HUKUM KORPORASI BUMN

oleh Prof. Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum

Wakil Ketua Dewan Pembina DPP IP-KI

Isu Utama:

Kasus korupsi di BUMN, termasuk LPEI, PT Taspen, PGN, ASDP, dan Pertamina, dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah.

Analisis:

Saat ini, hanya individu yang dijadikan tersangka, sementara korporasi BUMN belum dimintai pertanggungjawaban hukum.

Rekomendasi:

- Mendorong pembedaan korporasi BUMN sebagaimana diatur dalam UU Tipikor dan PERMA No. 13 Tahun 2016.
- Mengusulkan audit independen terhadap Pertamina terkait dugaan pengoplosan Peralite menjadi Pertamax.
- Mendesak penegakan hukum progresif dengan paradigma baru untuk menindak perusahaan pelat merah yang terlibat korupsi.

IDENTIFIKASI ISU UTAMA DAN TANGGAPAN

REFORMASI PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

oleh M. Fuad Nasar, S.Sos., M.Sc

Wakil Ketua Dewan Pakar DPP IP-KI

Isu Utama:

- Kebijakan BLU dan PTN-BH mendorong liberalisasi pendidikan tinggi, menyebabkan biaya kuliah meningkat.
- Kesejahteraan lansia belum menjadi prioritas dalam sistem jaminan sosial nasional.

Analisis:

- Pendidikan tinggi seharusnya kembali ke khittah konstitusi, dengan peran negara yang lebih kuat dalam pembiayaan.
- Negara harus lebih serius dalam menangani kesejahteraan warga lanjut usia melalui skema jaminan sosial yang lebih berkelanjutan.

Rekomendasi:

- Menghapus kebijakan BLU dan PTN-BH yang membuat perguruan tinggi semakin berorientasi bisnis.
- Memperkuat pendidikan agama dan budi pekerti dalam sistem pendidikan nasional.
- Membentuk skema BPJS khusus lansia, dengan pendanaan dari Dana Investasi Negara (Danantara).

IDENTIFIKASI ISU UTAMA DAN TANGGAPAN

REFORMASI HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

oleh Bpk Johnny W Maukar, SH., MM

Wakil Ketua Dewan Pakar DPP IP-KI

Isu Utama:

- Perluasan kebijakan *justice collaborator* bagi koruptor yang bersedia mengembalikan hasil korupsi dan mengungkap jaringan korupsi.
- Perlunya jaminan bahwa pimpinan partai politik tidak kebal hukum dalam kasus korupsi.
- Korupsi di Pertamina yang masih melibatkan perantara (broker) dalam pembelian minyak, meskipun Petral telah dibubarkan.

Analisis:

- Kebijakan pengampunan koruptor dapat dijadikan insentif untuk pemulihan aset negara, namun harus diimbangi dengan sanksi tegas bagi yang tidak kooperatif.
- KPK harus memastikan bahwa semua individu, termasuk pemimpin partai, mendapatkan perlakuan hukum yang adil tanpa intervensi politik.
- Ketidakefisienan dalam perdagangan minyak di Pertamina harus diatasi dengan kebijakan transparan dan penegakan hukum yang lebih tegas.

Rekomendasi:

- Mendorong penerapan kebijakan pemiskinan koruptor yang tidak beritikad baik serta memperketat regulasi bagi *justice collaborator*.
- Mewajibkan transparansi keuangan partai politik untuk mencegah praktik korupsi dalam pendanaan politik.
- Mengkaji ulang mekanisme pengadaan minyak nasional agar lebih efisien dan mengurangi keterlibatan *broker* internasional yang berpotensi merugikan negara.

IDENTIFIKASI ISU UTAMA DAN TANGGAPAN

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN EFISIENSI KEBIJAKAN EKONOMI

oleh Bpk Johnny W Maukar, SH., MM

Wakil Ketua Dewan Pakar DPP IP-KI

Isu Utama:

- Distribusi gas elpiji 3 kg yang tidak terkendali menyebabkan ketidakadilan harga di masyarakat.
- Praktik pengoplosan gas yang berpotensi merugikan masyarakat luas.

Analisis:

- Kebijakan pembatasan distribusi gas bersubsidi perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan kesiapan masyarakat dan mekanisme distribusi yang lebih transparan.
- Pengoplosan bahan bakar jika benar terjadi, merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan langkah hukum tegas.

Rekomendasi:

- Pemerintah harus **memetakan ulang sistem distribusi gas subsidi** agar lebih tepat sasaran.
- Memperkuat sistem pengawasan dan memberikan sanksi berat bagi pelaku pengoplosan gas yang merugikan masyarakat.

IDENTIFIKASI ISU UTAMA DAN TANGGAPAN

KEBIJAKAN KONTROVERSIAL DAN EFISIENSI ANGGARAN

oleh Bpk Johnny W Maukar, SH., MM

Wakil Ketua Dewan Pakar DPP IP-KI

Isu Utama:

- Pemotongan anggaran pemerintah dianggap sebagai langkah positif dalam efisiensi belanja negara.
- Banyak program perjalanan dinas dan pertemuan birokrasi yang tidak efisien dan membebani anggaran negara.

Analisis:

- Penyusunan APBN dan APBD masih dipengaruhi oleh kesepakatan birokrat, legislator, dan pengusaha yang kurang mempertimbangkan efisiensi.
- Beberapa program perjalanan dinas dan seminar memiliki efektivitas rendah dalam meningkatkan kualitas kebijakan.

Rekomendasi:

- Mendorong **audit independen terhadap belanja perjalanan dinas dan program pertemuan birokrasi** guna meningkatkan efisiensi anggaran.
- Mengalokasikan anggaran secara lebih ketat dengan prioritas pada program-program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

IDENTIFIKASI ISU UTAMA DAN TANGGAPAN

REFORMASI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA

oleh Bpk Johnny W Maukar, SH., MM

Wakil Ketua Dewan Pakar DPP IP-KI

Isu Utama:

- Kebijakan alokasi 20% anggaran pendidikan dalam APBN dinilai tidak berbasis kebutuhan riil.
- Kurangnya fokus pada pembangunan karakter dan nasionalisme dalam kurikulum pendidikan.

Analisis:

- Anggaran pendidikan perlu disusun berdasarkan kebutuhan riil, bukan hanya mengikuti ketentuan konstitusional tanpa kajian mendalam.
- Pentingnya penguatan pendidikan karakter sejak dini untuk membangun generasi muda yang nasionalis dan berintegritas.

Rekomendasi:

- Melakukan **efisiensi alokasi anggaran pendidikan** dengan fokus pada infrastruktur dan peningkatan kualitas guru.
- Memperkuat kurikulum pendidikan karakter dengan menambah jam pelajaran tentang **nasionalisme, patriotisme, dan anti-korupsi** di tingkat SD hingga SMA.
- Mengalokasikan dana khusus untuk **pelatihan guru psikologi anak** agar lebih efektif dalam membentuk karakter generasi muda.

IDENTIFIKASI ISU UTAMA DAN TANGGAPAN

Tata Kelola Pemerintahan, Demokrasi, dan Hukum

oleh Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.H., S.I.P., S.A.P., S.Pd., M.H., CPM

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP IP-KI

Isu Utama:

- Komunikasi publik pemerintah yang kurang efektif.
- Minimnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan RUU strategis.
- Polemik penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil.
- Kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum semakin lemah.
- Ketidakpastian keberlanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN).
- Isu kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk tukin dosen yang belum dibayarkan sejak 2020.

Rekomendasi:

- Meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan strategis, terutama dalam RUU KUHP.
- Meninjau ulang regulasi terkait TNI aktif di jabatan sipil agar tidak bertentangan dengan UU TNI.
- Mendorong reformasi di sektor penegakan hukum untuk meningkatkan kepercayaan publik.
- Mewajibkan pembayaran tukin dosen sebagai bagian dari komitmen negara terhadap pendidikan tinggi.

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

DPP IP-KI perlu mengambil langkah strategis dengan:

1. Mengeluarkan pernyataan sikap resmi terkait isu-isu utama yang telah diidentifikasi.
2. Menyusun kajian mendalam dan rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada pemangku kebijakan.
3. Menggalang dukungan publik melalui kanal digital dan diskusi terbuka agar isu-isu strategis ini mendapat perhatian luas.
4. Menjalin komunikasi strategis kepada para pemangku kebijakan penyelenggaraan negara, agar usul saran maupun kajian dari DPP IP-KI dapat menjadi bahan pertimbangan penerbitan maupun pengambilan kebijakan yang sesuai dengan cita-cita luhur Proklamasi, sebagaimana tertuang dalam mukadimah undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

Sekali Layar Berkembang, Surut Kita Berpantang!

Dewan Pengurus Pusat

Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia